

**KOMISI I DPR-RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)**

---

Tahun Sidang : 2006-2007  
Masa Persidangan: III  
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Kamis, 25 Januari 2007  
Waktu : Pukul 19.00 WIB  
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga  
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR-RI  
Acara : 1. Kata Pengantar oleh Ketua Rapat  
2. Penjelasan oleh Menteri Luar Negeri  
3. Tanya Jawab  
4. Penutup  
Hadir : 39 orang Anggota dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI  
Pemerintah : Menteri Luar Negeri, DR. Noer Hassan Wirajuda, S.H., L.L.M., beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2007 dengan waktu dan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI minta Departemen Luar Negeri untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan programnya, agar penyerapan anggaran lebih maksimal, serta Departemen Luar Negeri perlu merumuskan parameter yang jelas sebagai dasar penilaian terhadap pelaksanaan anggaran yang berbasiskan kinerja, dan kinerja Pejabat/Diplomat RI di Luar Negeri.
2. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah agar wakil Departemen Luar Negeri secara langsung dilibatkan dalam organisasi dan penyelenggaraan fungsi Badan Penempatan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dipimpin oleh Presiden sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Penempatan TKI di Luar Negeri. Dalam hubungan ini, Pemerintah perlu meningkatkan upayanya dalam pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri, terutama dalam melindungi, membela, dan memberikan bantuan hukum terhadap para TKI di Luar Negeri khususnya para TKI yang saat ini menghadapi ancaman hukuman pancung/hukuman mati

3. Komisi I DPR RI berpendapat bahwa Departemen Luar Negeri c/q Perwakilan RI di Saudi Arabia harus dilibatkan secara dini dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan Ibadah Haji di Saudi Arabia, agar pelaksanaan Ibadah Haji semakin efektif, efisien, dan terhindar dari peristiwa yang merugikan umat dan mengurangi kenyamanan serta kesucian ibadah.
4. Komisi I DPR RI minta agar Pemerintah mengevaluasi program NAMRU (Naval American Medical Research Unit) yang telah berlangsung hampir 40 tahun dan apabila terdapat temuan bahwa program tersebut tidak mendatangkan keuntungan yang memadai bagi kepentingan Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan, agar program tersebut dihentikan.
5. Komisi I DPR RI minta Pemerintah meningkatkan perannya melalui berbagai forum bilateral, multilateral, regional, maupun global untuk mendesak Pemerintah Myanmar agar segera memulihkan kehidupan demokrasi dan penegakan HAM sesuai dengan Road Map to Democracy serta membebaskan pejuang demokrasi Myanmar, Aung Sang Suu Kyi dan seluruh tahanan politik. Dalam hubungan ini, Pemerintah harus bersikap pro aktif dan affirmative dalam diplomasi di berbagai forum, termasuk dalam Dewan Keamanan PBB sesuai dengan misi perjuangan pemulihan kehidupan demokrasi di Myanmar.
6. Komisi I DPR RI mendesak Departemen Luar Negeri untuk mengevaluasi dengan pembahasan secara komprehensif dan interdept mengenai keberadaan Atase Teknis pada Perwakilan RI di Luar Negeri berdasarkan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi pencapaian misi Perwakilan RI, serta rationalisasi dan manfaat yang sebesar-besarnya.
7. Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk memanfaatkan posisi Indonesia sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB dengan meningkatkan secara proaktif peranan dan kontribusi di dalam penyelesaian konflik/ketegangan di berbagai bagian dunia yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, seperti penyelesaian konflik Timur Tengah dengan memperjuangkan tercapainya kemerdekaan dan keadilan bagi Palestina, penyelesaian damai atas ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat/Negara-negara Barat mengenai isu pengkayaan nuklir, dan masalah isu nuklir di Semenanjung Korea.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 01.20 WIB (dini hari)

KETUA RAPAT

**THEO L. SAMBUAGA**  
A- 525